

# PERAN PENTING UKAM DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN PROSPEKNYA

Ibrahim Hafid \*)

*Abstract : This erudite Article Masterpiece aim to to know and comprehend about condition, potency and prospect UMKM in its role overcome the economics crisis which nowadays is taking place. Others to know how involvement of the parties to be powered of Body of is Effort People Property (BUMR) in develop;building economic systems of sturdy nation, delay and hold up from various terpaan crisis. This Article masterpiece is compiled by pursuant to with the theoretical concept of contemporary economics, governmental policy, result of research, related/relevant data empirik by UMKM is itself beside conception and kreasi imagine its writer.*

*From result of is overall of this article solution is known that by the UMKM which grow and expand to the manner born and healthy play a part important in develop;building economic system of nation. This matter is measured from various indicator; UMKM give the konstribusi of forming PBB which high enough, market creator, innovate and kreasi, improving exporting nonmigas, penyedia employment overcome the unemployment which have estuary to of at make-up of prosperity and purchasing power society. Data BPS indicate that the year 2006 UMKM amounting to ± that 40.199.632 business unit permeate the labour ± 73. Million people, contributing PDB 63,54% and support the exporting nonmigas of equal to 18,72% from totalizing exporting in national.*

*To increase higher level role UMKM ketingkat and that massif BUMR need the policy of like environment of corporate world which kondusif, training of business skill and require the financing for that Governmental keberpihakan involvement and, circle of Academician and its involvement Banking world is very needed*

*Keyword : Economic System, fair UMKM and policy*

## Pendahuluan

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) merdeka tahun 1945, kini usianya sudah mencapai 64 tahun jika umur itu di analogikan dengan usia manusia, umur itu tergolong usia tua. Diusia lanjut itu Republik ini tetap tergolong negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah. Pemerintah belum mampu mengangkat harkat, martabat dan derajat kesejahteraan rakyatnya secara terhormat, walau diakui bahwa dari satu orde pemerintahan, ke orde pemerintahan yang lain telah berusaha membangun fundamental ekonomi bangsa demi terwujudnya visi dan cita-cita berdirinya Republik Indonesia yakni masyarakat adil dan makmur.

Pemerintah orde lama di bawah kendali Presiden Soekarno berkuasa sejak 1945-1965 telah bereksperimen untuk menerapkan sistem ekonomi sosial, namun gagal kondisi negara pada zaman pemerintahan orde lama yang sulit terlupa-

kan adalah kondisi ekonomi yang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan tingkat inflasi yang mencapai 600%, pengangguran yang cukup tinggi, pasar gelap, kemiskinan bahan kebutuhan primer hilang dari pasaran. Krisis ekonomi, sosial dan politik pemerintah orde lama pun “tumbang”.

Pemerintah berganti dari orde lama ke orde yang menamakan diri orde baru berkuasa selama 32 tahun dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dan di legitimasi melalui Pemilu tahun 1967. Pemerintah orde baru melaksanakan roda pemerintahan dengan konsep Trilogi Pembangunan yang pelaksanaannya melalui tahapan PELITA konsep ini membuahkan banyak keberhasilan namun juga kegagalan dan kehancuran. Dan siapapun diantara anak bangsa, bahkan intitusi bank dunia pun turut takjub dan mengakui ekonomi Indonesia mengalami kemajuan pesat sehingga disebut sebagai MIRACLE. Atau Indonesia disebut sebagai negara Newly Industrialize Country (NIC)

dengan beberapa indikator keberhasilan PDB (Product Domestic Bruto) mengalami pertumbuhan rata-rata 6,6 % pertahunnya, income perkapita melampaui US \$ 1.000, penurunan laju inflasi dari 600% menjadi satu digit pada tahun 1997. Peningkatan pendapatan petani dan tercapainya swasembada pangan pada tahun 1980-an, peningkatan pendapatan masyarakat ditingkat lapis bawah ini mendorong tumbuh berkembangnya berbagai industri, usaha dan juga berkembangnya ekonomi rakyat. Selain itu penurunan tingkat prosentase penduduk miskin secara nasional, turun secara drastis dari 69% (tahun 1970) menjadi 20% (1996). Prestasi kerja ini pula diimbangi dengan bidang jasa pelayanan masyarakat seperti halnya kesehatan, pendidikan, penurunan angka kelahiran dan keamanan, mengalami perbaikan yang membesarkan hati. Pembangunan ekonomi orde baru mengadopsi sistem ekonomi kapitalis melalui teori pertumbuhan dan pembangunan yang digagas oleh W. Withman Rostow 1960 (Deliarno 2003) dalam teori Pertumbuhan dan Pembangunan menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju dan membangun pondasi ekonomi yang kokoh dan tahan dari krisis, maka konsep pembangunannya harus melalui tahapan-tahapan kegiatan permbangunan antara lain : (1) tahap Tradisional Statis yang dicirikan oleh keadaan; Iptek sangat rendah perekonomian di dominasi sektor pertanian pedesaan dan struktur sosial politik bersifat kaku (2) Tahap Transisi (pra take-off), Iptek mulai berkembang, produktivitas meningkat dan industri semakin berkembang, tenaga kerja beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan tinggi kaum pedagang bermunculan dan struktur sosial semakin membaik (3) Tahap Lepas Landas, Iptek semakin maju, investasi dan pertumbuhan tetap tinggi dan mulai terjadi ekspansi perdagangan keluar negeri (4) Tahap Dewasa (Maturing Stage) masyarakat semakin rasional dan penggunaan Iptek semakin maju, terjadi perubahan komposisi angkatan kerja dimana jumlah tenaga kerja

yang skilled lebih banyak dari yang unskilled. Serikat dagang, gerakan buruh semakin berpengaruh dan berperan, pendapatan perkapita tinggi (5) Tahap Konsumsi Massa (*Mass Consumption*) masyarakat hidup serba bercukupan kehidupan dirasakan aman tentram, laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Konsep ini dioperasionalkan dibawah koordinasi tim kerja Wijoyo Nitisastro Dkk, ekonom kelompok lulusan Burkly University AS.

Selanjutnya Rostow berpendapat bahwa konsep itu hanya bisa terwujud jika dipenuhi beberapa kondisi antara lain : Pemerintahan stabil adanya perbaikan dalam tingkat pendidikan, adanya kelompok investor dan enterpreneurship yang mampu memanfaatkan tabungan masyarakat dan mengembangkan perdagangan.

Pengentasan kemiskinan berjalan sesuai harapan di tandai lahirnya UU No. 1/1967 tentang PMA yang diperbaharui melalui UU No. 11/1970 berhasil mengundang investor asing menanam modal di Indonesia dengan syarat investasi harus padat karya. Demikian juga UU No.12/1970 tentang PMDN mampu menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, mampu mendorong produksi distribusi dan konsumsi dengan baik, usaha-usaha industri di dorong untuk kepentingan ekspor. Proses pembangunan di rencanakan melalui tahapan dan terencana dengan baik dengan istilah REPELITA.

Dibalik sukses itu terdapat juga banyak kegagalan dan kelemahan, terutama dimasa paruh pertengahan (1980-akhir) pemerintahan Soeharto memimpin dengan ciri sentralistik otoriter, militerisme demi terwujudnya stabilitas pemerintahan dan keamanan. Motif dan kebijakan ekonomi mulai dipengaruhi oleh keluarga, kroni dan pengusaha sehingga struktur kekuasaan yang sangat dekat dengan bisnis mengakibatkan proses pengambilan keputusan mengalami benturan kepentingan. Kebijakan ekonomi yang diskriminatif yang memberikan keuntungan pada golongan etnis Tionghoa lahirlah disebut konglomerat. Kebijakan-kebijakan yang diambil

mengabaikan kelompok mayoritas penduduk Republik ini, KKN berkembang subur yang membunuh kreatifitas para pengusaha pribumi membuat hati kecut pengusaha asing. Memperbodoh masyarakat dengan konsep perdagangan tata niaga; Pengembangan Usaha dengan motto TRICKLE DOWN EFFECT usaha besar diberi berbagai macam fasilitas dengan harapan usaha besar akan membantu usaha kecil? Panah hukum hanya membidik orang-orang lemah, miskin, tidak punya koneksi, demokrasi ekonomi yang tidak adil, utang luar negeri dan dalam negeri yang melampaui jumlah PDB. APBN yang defisit ditutup dengan utang luar negeri dan 30% diantara pinjaman itu di korup oleh pejabat yang tidak bermoral dan tanpa sangsi apa-apa. Akibat kebijakan yang dikriminatif itu melahirkan golongan oligarki yakni mereka para penguasa yang tetap ingin berkuasa dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa, memperkaya diri keluarga, dari hasil korupsi kekayaan negara. Yang menimbulkan serta menciptakan sinisme sosial. dengan kondisi ini Mei 1998 Presiden Soeharto dipaksa mundur oleh golongan sakit hati yang menamakan diri kelompok Reformis dan didukung oleh mahasiswa, negara kacau, kondisi sosial, ekonomi, keamanan politik mengalami Chaos, jatuhnya Soeharto sejarah terulang kembali.

Soeharto mengundurkan diri, kepemimpinan negara diserahkan kepada BJ. Habibie di era reformasi ini dalam kurun waktu tidak cukup 5 tahun terjadi pergantian Kepala Negara sebanyak 4x dari BJ. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid, dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri, Presiden Megawati Soekarno Putri digantikan oleh Mantan Menteri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Megawati Kalah dalam Pemilu tahun 2004.

Tahun 2004 Presiden SBY didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), didalam pemerintahan ini ditopang oleh Bauran Birokrat, Teknorat dan pengusaha, mayoritas penduduk bangsa ini menaruh

harapan kemakmuran, keadilan dan kemaman dari pemerintahan baru ini sesuai janji-janji pada saat kampanye. Duet SBY - JK mencoba membangun fundamental ekonomi bangsa dengan tidak meniru model ekonomi orde Lama, dan orde baru tetapi mencoba mengadopsi sistem ekonomi kerakyatan yang banyak disuarakan oleh cerdik-pandai dari kalangan akademisi dan LSM. Ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai wadah organisasi bisnis usahanya, hal ini ditandai dengan diluncurkannya konsep SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan) pada tanggal 8 Juni 2005. Ditanda tangani oleh Menko Kesra bersama Gubernur BI, sebagai pelaksana kegiatan SNPK dihadirkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang isinya antara lain pemberdayaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM), untuk mendukung konsep baru lahirlah Inpres No. 6 /2007 tentang Pembinaan Dan Pemberdayaan UMKM yang isinya antara lain (1) Peningkatan akses pada sumber pendanaan (2) Pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia (3) Peningkatan peluang pasar (4) Reformasi paket pemberdayaan UMKM.

Pemerintahan SBY-JK terus mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM, hal ini ditandai masih banyaknya program lain yang terkait dengan usaha rakyat itu seperti KUR, PNPM Mandiri, BLT (Bantuan Langsung Tunai). Konsep BLT banyak mendapatkan kritikan dari partai-partai politik, bahkan dari lingkungan pemerintahan sendiri, pandangan mereka adalah masyarakat sebaiknya diberikan *pancing bukan ikan* agar mereka tidak menjadi pemalas dan pengemis. BLT mungkin bukan bagian pemberdayaan ekonomi rakyat tetapi barangkali SBY-JK mencoba mewujudkan amanah UUD 45 tentang Pasal Fakir Miskin mendapat perlindungan dari Negara.

## **Sistem Ekonomi di Era Reformasi**

Kini ditahun 2009, diadakan Pemilihan Umum, Pemilu legislatif di Bulan April 2009 ini dan sesudahnya akan diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, siapapun pemenangnya mayoritas penduduk tetap menghendaki ekonomi rakyat tetap menjadi lokomotif penggerak pembangunan ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat, dengan demikian ekonomi rakyat adalah aktifitas ekonomi yang dilaksanakan rakyat banyak dalam suatu sistem ekonomi yang disebut ekonomi kerakyatan (Mubiyarto, 1997). Pemerintah baru yang terpilih nantinya tidak perlu gamang membangun fundamental ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai wadah organisasi bisnisnya menjadikan UMKM sebagai pilar pembangunan untuk keluar dari krisis ekonomi bukan suatu ilusi atau mimpi disiang hari bolong. UMKM tumbuh dan berkembang adalah penggerak raksasa ekonomi dan kemakmuran bangsa. UMKM yang tumbuh dan berkembang secara wajar akan mampu menjawab permasalahan krisis ekonomi dan keuangan sepanjang kebijakan pemerintahan akan berpihak kepadanya, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dengan sendirinya mengurangi pengangguran. meningkat PDB, menciptakan pangsa pasar baru baik supply side maupun demand side.

Banyak contoh negara maju dan rakyatnya hidup berkecukupan dengan basis UMKM sebagai motor penggerak ekonominya. Prancis sebagai produsen Wine (Anggur) dan parfum utama di dunia, Belanda adalah raksasa bunga dan tanaman hias daun di pasar internasional. AS, Inggris dan negara maju lainnya tunduk kepada Belanda untuk urusan bunga. Industri wine dan parfum di Prancis serta bunga di Alshimer Belanda di dominasi oleh pelaku berkelas mikro namun pelaku kelas teri ini dilindungi oleh kebijakan pemerintah. Hal yang sama terjadi di Thailand penghasil buah tropis utama di dunia, Taiwan dengan agro industri sayur,

RRC dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi  $\pm 10\%$  pa. Semua digerakkan oleh UMKM (Dikutip dari berbagai sumber). Untuk mewujudkan itu, kebijakan pemerintah mutlak harus berpihak. Adalah benar HERNANDO DE SOTO seorang ekonom Kliber dunia yang berkebangsaan Peru menyatakan dalam *penelitiannya bahwa musuh utama sektor informal atau hancurnya ekonomi rakyat di Negara-negara berkembang karena ulah pemerintahnya sendiri (Kompas 11/2006)*. Di Indonesia temuan De Soto itu terbukti, lihatlah pengusaha UMKM yang telah mendapatkan SIUP/SITU di pasar-pasar tradisional ketika pasar itu akan direnovasi oleh pemerintah untuk kepentingan golongan tertentu mereka pengusaha mikro itu dipaksa henggang dari tempatnya berusaha, bukan cuma itu lihatlah ulah Satpol PP diberbagai daerah, dalam menertibkan pedagang kaki lima tindakannya brutal mungkin lebih kejam dari penjajah Belanda.

Terlepas dari berbagai kelemahan UMKM baik secara organisasi kelembagaan, maupun karakter pemilik/Pemimpin usahanya, mereka tetap harus dibina bukan dibinasakan, mereka berhak hidup diatas tanah tumpah darah dengan perlindungan pemerintahannya. Kelemahan utama usaha mikro dari sisi kelembagaan menurut Mudrajat (2003) antara lain (1) Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperoleh pangsa pasar (2) Kelemahan dalam struktur modal dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber permodalan (3) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen serta SDM (4) Keterbatasan jaringan kerjasama antara sesama pengusaha kecil (5) Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan (6) Pembinaan yang kurang padu serta kepedulian para pihak yang minim. Sementara kelemahan dari sisi watak dan karakter kepemimpinan menurut Marbun (1998) antara lain adalah (1) Keluarga sentris dan tidak ada pengkaderan (2) Berusaha untuk hari ini bukan hari esok dan cepat puas diri (3) Mem-

percaya tahayyul daripada ilmu modern (4) Tidak memiliki pengetahuan bisnis yang relevan (5) Dan sebagainya. Mungkin dengan faktor-faktor inilah sehingga para pengusaha kelas Gurem (meminjam istilah Kian Gie) mereka tidak dapat dikategorikan sebagai enterprenurship oleh Ciputra.

### UMKM Kekuatan dan Harapan Ekonomi Nasional

Terlepas dari segala kekurangan itu UMKM telah terbukti menunjukkan ketangguhan dan fleksibilitasnya jenis usaha ini ketika krisis keuangan tahun 1998

berubah menjadi krisis multi dimensi yang menyebabkan usaha besar milik para konglomerat keturunan Cina yang di proteksi dengan berbagai fasilitas oleh pemerintah orde baru berjatuh, seiring jatuhnya pemerintahan Soeharto. UMKM tampil menyelamatkan ekonomi bangsa menampung tenaga kerja yang terkena PHK, meningkatkan ekspor menyumbang PDB. Data statistik yang dikutip Harian Bisnis Indonesia tahun 2006 menunjukkan angka-angka perbandingan peran antara usaha kecil menengah dan besar sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :

**Peran Usaha Kecil, Menengah dan Besar Terhadap Penyerapan TK dan Ekspor Tahun 2006**

No	Uraian	Satuan	Jenis			Jumlah
			UK	UM	UB	
1	Badan Usaha	Unit	40.133.773	57.743	2.095	40.193.611
2	Kontribusi PDB di luar migas	%	46,12	17,42	36,46	100%
3	Penyerapan TK	Orang	65.246.294	7.993.439	406.205	73.645.938
4	Ekspor tanpa migas	%	4,41	14,31	81,28	100%

Sumber : Bisnis Indonesia 2006

Tabel ini menunjukkan bahwa UMKM memberikan segala sesuatu yang diperlukan dalam mengatasi krisis multi dimensi, kontribusi terhadap PDB 46,12% dan 17,42%, sementara penyerapan tenaga kerja masing-masing 65,246,294 orang dan 7,993,439 orang, demikian juga dalam perolehan devisa melalui ekspor UMKM menyumbang 4,14% dan 14,31% dengan angka-angka itu menunjukkan bahwa UMKM adalah motor penggerak ekonomi bangsa, UMKM adalah sumber kreasi dan inovasi serta pencipta pasar. Harapan masa depan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan untuk mendorong dalam memulihkan ekonomi yang konstrutif UMKM memerlukan regulasi dan perlindungan usaha dari pemerintah dengan tujuan mengembangkan potensi dua kekuatan ekonomi yakni kelompok UMKM dan golongan usaha besar. Adalah sesuatu yang tidak adil apabila UMKM dibiarkan berhadapan bersaing dengan

usaha besar yang telah memiliki modal besar dan strategi bisnis segalanya. Hal ini penting mengingat potensi UMKM bukan hanya sampai titik prestasi itu kita kehendaki. Namun peran yang lebih besar lagi untuk membangun dan memulihkan ekonomi nasional. Tak terbantahkan oleh karena kontribusi UMKM itulah ekonomi Indonesia bisa bertahan keresahan sosial, politik dan keamanan pun bisa terhindarkan. Dapat dibayangkan andai tidak ada UMKM yang dapat menampung tenaga kerja yang berjumlah ±75 juta orang belum termasuk tanggungan keluarga mereka, negara ini pasti Chaos. Ingat kembali tumbangnya orde lama dan orde baru salah satu penyebabnya adalah kekacauan ekonomi. Rakyat yang lapar mudah terpropokasi untuk berbuat anarki dan bukan cuma itu Agama Islam mengingatkan bahwa kefakiran sangat dekat dengan kekafiran. Untuk itu pemerintah tidak perlu gamang dan ragu mendorong dan memberikan

stimulus kepada unit bisnis UMKM agar fundamental ekonomi bangsa bisa kokoh dan kuat dari berbagai pengaruh krisis termasuk pasar global.

Kriteria umum menunjukkan bahwa pengelompokan UMKM terdiri usaha mikro kecil dengan omzet penjualan antara sekian ratus ribu rupiah s/d Rp. 1 Milyard dengan mempekerjakan antara 1-10 orang. Sementara usaha menengah omzet penjualannya antara Rp. 1 milyar s/d 10 milyar/per tahun dengan mempekerjakan tenaga kerja antara 10-20 orang. Jika usaha mereka tumbuh oleh karena adanya pembinaan, kerjasama dengan usaha besar serta keterlibatannya dalam mendapatkan aliran dana pembangunan dan investasi pemerintah (diskreasi) dalam bentuk pengadaan barang, pemanfaatan jasa dan supply bahan keperluan yang dibutuhkan oleh suatu proyek pemerintah maka omzet penjualan mereka pasti naik dan dalam peningkatan omzet penjualan, asumsinya adalah bertambahnya akan kebutuhan tenaga kerja. Andai misalnya dari  $\pm 40$  juta unit bisnis UMKM yang sudah beroperasi itu 50% dari unit bisnis itu membutuhkan satu orang tenaga kerja maka pengangguran dapat tertanggulangi sebesar  $\pm 20$  juta orang. Asumsi terjadinya pengangguran sebesar 10% di tahun 2009 dengan sendirinya teratasi. Ini adalah angka yang spektakuler luar biasa asumsi Ini bukan hal mustahil simaklah pandangan Michael Porter (pengarang Kesohor Buku Manajemen) mengatakan bahwa pertumbuhan usaha kecil dan menengah selalu menciptakan nilai tambah.

Selanjutnya kalau dari penggolongan usaha itu ada upaya untuk ditingkatkan dari yang terbawah usaha mikro (dengan pangkat kelas I misalnya) yang dikelompokkan sebagai tradisional market, naik setingkat menjadi usaha kecil (kelas 2) dan bermain dipasar-pasar kecil dengan skala yang lebih luas, lalu naik lagi menjadi usaha menengah (kelas 3) dan bisa menjadi semi grosir, dari kelas 3 semi grosir bisa menjadi grosir, dari grosir bisa menjadi sub agent, atau pemilik gerai dari strata ini menjadi

distributor setelah distributor kelasnya semakin naik dan membaik. Kondisi seperti ini seorang pengusaha mikro bisa menaikkan omzet dari puluhan ribu Rupiah menjadi ratusan juta rupiah, selanjutnya dari ratusan juta rupiah menjadi milyar rupiah, hal ini tentu saja tidak gampang untuk mewujudkannya, membutuhkan waktu pembinaan dan variabel lain misalnya tambahan modal dan secara konsisten pengusaha gurem itu menambah pengetahuan market skill, skill management kedua keterampilan itu tidak bisa ditawarkan dalam dunia bisnis modern.

Terkait dengan hal tersebut diatas indikator pengembangan dan pertumbuhan unit bisnis usaha adalah jika memenuhi tiga orientasi (1) Orientasi ukuran yakni pertumbuhan sebagai suatu peningkatan dalam dimensi dari perusahaan dalam pengertian; penjualan, volume dan fungsi pasar (2) Orientasi profit yakni pertumbuhan utamanya adalah laba (3) Orientasi Nilai adalah rewards yang diterima oleh pemilik modal (Crejins dan Oogie 2000).

Dan untuk mempercepat proses waktu dalam pembinaan UMKM untuk mewujudkan harapan seperti yang dikemukakan oleh Crejins dan Oogie yang dapat berdampak luas terhadap pemulihan krisis ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan strategi pengembangan UMKM yang perlu diperhatikan pada saat sekarang ini adalah (1) Aspek Managerial (2) Aspek Modal (3) Pengembangan Program kemitraan dengan usaha besar (4) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan (5) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Pemerintah sebagai institusi regulasi harus membuat kebijakan yang adil, pemerintahan Republik ini tidak boleh berpihak kepada golongan tertentu seperti sistem ekonomi yang dipraktekkan pemerintahan Orde Baru memperkaya keluarga, kroni dan segelintir orang lain dengan sebutan Konglomerat, memiskinkan dan memarjinalkan puluhan juta penduduk.

Penduduk yang berbisnis di pasar-pasar tradisional jangan hanya dikunjungi dan diajak bicara dalam kurung waktu satu kali dalam lima tahun, calon pejabat dan anggota legislatif nongol di tempat kumuh itu ketika mereka mengharapkan dukungan politik, sesudah itu lupa diri, karakter semacam ini adalah perilaku para Bandit. Perbuatan tidak terpuji, tercela dan tidak bermartabat. Ingatlah dan sambangilah mereka selalu sebab mereka itu adalah pemegang saham Republik ini, yang setiap lima tahun dapat "Memecat" Presiden dan anggota legislatif jika mereka tidak menyukai perangai para pemimpin itu. Berdayakan hidupnya dan angkat derajatnya, ciptakan iklim usaha yang kondusif agar masyarakat terdorong dan tidak ragu membuka dan mengembangkan bisnisnya melakukan investasi dan mendorong ekspor, sekaligus benahi sistem pelayanan aparat pemerintah yang kakuh bermental pengemis, mencegah dan melaksanakan beberapa syarat antara lain : Berantas markup, pungutan liar, korupsi, kolusi, pemerasan perijinan dan bentuk inefisiensi lainnya dalam tubuh pemerintahan oleh karena variabel ini menjadi penyebab utama lemahnya daya saing produk Indonesia. Jangan lupa bahwa uang yang dikeluarkan oleh pengusaha untuk membiayai transaksi pungutan ilegal itu pasti dibebankan kedalam ongkos produksi yang menyebabkan harga jual produk menjadi mahal dan tidak bisa laku terjual.

Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sesuai hasil penelitian dalam rangka penulisan disertasi dengan judul Pengembangan UMKM melalui analisis pengaruh struktural; lingkungan dunia usaha, skill manajemen dan kredit perbankan terbukti secara simultan ketiga variabel itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM di Sulawesi Selatan baik dari sisi volume penjualan maupun laba usaha (Hafid Ibrahim - 2008). Oleh sebab itu untuk mewujudkan UMKM yang sehat, produktif dan dapat bermanfaat bagi

berbagai kalangan menangkal krisis ekonomi, keuangan dan kemandirian ekonomi bangsa keberpihakan kebijakan kepada ekonomi rakyat UMKM adalah rasional.

### **Penutup**

Dari keseluruhan pembahasan dan pengungkapan fakta yang didukung data empirik dalam karya tulisan ilmiah ini mulai dari pendahuluan, sampai pada pemaparan peran penting UMKM dalam pemulihan krisis ekonomi terungkap hal-hal penting seperti berikut ini (1) Bahwa dalam memilih dan membangun sistem ekonomi sebuah bangsa, keberpihakan dan dukungan politik pemerintah yang berkuasa mutlak diperlukan tanpa reserve. Menjadi contoh ekonomi sosialis yang digagas oleh Orde Lama dengan penanganan setengah hati "Runtuh" dan meninggalkan ekonomi yang amburadul, demikian pula sistem ekonomi kapitalis yang diuji coba dipraktekkan oleh pemerintahan orde baru jatuh berantakan mewariskan kondisi ekonomi yang chaos. Dan di jaman reformasi ini jika pemerintah menentukan pilihan pada sistem ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai wadah organisasi bisnisnya, keberpihakan politik untuk mengamankan pilihan itu harus pasti, nyata dan tidak boleh ragu (2) ekonomi rakyat dengan UMKM sebagai wadah organisasi bisnisnya memiliki ketangguhan dan fleksibilitas yang cukup tinggi dari terpaan krisis, terbukti dalam kondisi krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi sejak 1990-an hingga pada saat ini ternyata mampu menampung tenaga kerja yang cukup tinggi, mendorong ekspor, menyumbang PDB dan pencipta pasar baik sisi supply maupun sisi demand (3) untuk lebih meningkatkan peran UMKM dalam membangun fundamental kemandirian ekonomi yang kokoh, kuat dari berbagai terpaan krisis, kelemahan unit bisnis rakyat seperti lingkungan dunia usaha Skill Management dan pendanaan diperlukan keterlibatan pihak pemerintah, kalangan akademisi dan dunia perbankan untuk

mengatasinya (4) selain itu perlu ada kesadaran semua pihak terutama pemerintah agar pembangunan sebuah proyek melibatkan UMKM sebagai rekanan atau pemasok material, sehingga tercipta kreasi ekonomi ditingkat usaha rakyat. Disamping itu perlunya dibangun kemitraan *Simbois Mutualistis* antara Usaha Besar dan UMKM yang saling menguntungkan dan pemerintah sebagai mediatornya (5) dengan UMKM yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, badan usaha milik rakyat ini akan menjadi agen pembangunan dan pembaharuan dalam mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arief Idris (1999), *Ekonomi Rakyat dan Implikasinya dalam Kehidupan Perekonomian Indonesia*, Pidato Penerimaan Guru Besar IKIP Ujung Pandang, Tidak Dipublikasikan
- Bill Greech (1996), *Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu (TQM), Cara Membuat Total Qualirt Manajemen Bekerja Bagi Anda*, Bina Rupa Aksara, Jakarta
- Budi Susilo, Arif (2001), *Menggugat IMF, pergulatan Indonesia bangkit dari krisis*, Penerbit Bina Rina Parawira Jakarta.
- Crijns & Ooghi (2000), *Growth Paths of Medium Sized Entrepreneurial Companies*, De Vierick Scholl Voor Management University of Ghent.
- Deliarnov (2003) *“Perkembangan Pemikiran Ekonomi”*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Faisal Basri (1997), *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI, Distorsi Peluang & Kendala*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Goeltom, Miranda S. (2007), *“Essays in Macroeconomic Policy : The Indonesian Experience”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hafid, Ibrahim, 2008, *Pengembangan UMKM melalui analisis Struktural lingkungan dunia usaha keterampilan management dan kredit perbankan disertasi Unhas tidak dipublikasikan*
- Kotler, Philip (2003) *Marketing Management* Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 07458.
- Kuncoro Mudrajat, Suharyono (2000) *Manajemen Perbankan ; Teori dan Aplikasi, Edisi I, BPFE-UGM, Yogyakarta.*
- Kwik Kian Gie, (1998), *Gonjang-Ganjing Ekonomi Indonesia: Badai Belum Akan Segera Berlalu*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marbun, B.N. 1993. *“Kekuatan dan Kelemahan Perusahaan Kecil. Mengapa Ribuan Perusahaan Kecil Rontok Setiap Tahun, Adakah Jalan Keluarnya ? “*. Cetakan kedua. Seri Manajemen No. 126. PT. Pustaka Binawan Pressindo, Jakarta.
- Mubiyarto (1997) *Ekonomi Rakyat, Program IDT, Demokrasi Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta.



Samuelson, Paul A., William D. Nordhaus (1985), *Economics*, Edisi ke-12 McGraw Hill.

Suyatno, Thomas, dkk (1991), *Manajemen Bank dan Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tambunan, Tulus, T.H. (2002), *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting*, Edisi Pertama, Salemba Empat Jakarta.

Willkinson B. (2002), *Small, Mikro and Medium Enterprises Development Expanding The Option Foor Debt and Equity Finance*.

Yustika AE (2002) *Pembangunan dan Krisis, memetakan perekonomian Indonesia* Penerbit. Grasindo Jakarta.

\*) Penulis adalah Dosen tetap STIE – YPUP Makassar